

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya semenjak pertama kali ia dilahirkan. Anak adalah salah satu aset berharga bagi keluarga, bangsa dan negara serta sebagai generasi penerus yang kelak akan memberikan kontribusi dan dedikasinya. Namun anak dalam perkembangannya menuju dewasa adalah masa-masa yang rentan terpengaruh akan lingkungan yang ada disekitarnya, masa tersebut kita kenal sebagai masa remaja. Pada masa remaja inilah anak terbilang cukup peka terhadap apapun yang ada disekelilingnya karena keadaan emosional yang labil kemudian berdampak kepada rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang baru kemudian tidak sedikit mengantarkannya kepada hal-hal negatif.

Secara umum, masa beranjak anak-anak menuju dewasa masih tidak memiliki banyak bekal untuk melindungi dan menolak ajakan-ajakan negatif sehingga karena hal demikianlah yang kemudian berimbas terhadap banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan ironisnya anak-anak sebagai dalang dari banyak penyimpangan tersebut. Terdapat banyak penyimpangan yang seringkali dilakukan oleh anak yang salah satunya ialah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, penyimpangan dimaksud tentu memiliki banyak faktor, antara lain yakni proses pembangunan yang terlalu cepat, pesatnya arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, perkembangan IPTEK serta korelasinya terhadap

gaya hidup.<sup>1</sup> Semua hal tersebut tidak terelakkan lagi telah membawa perubahan sosial yang mendasar terhadap kehidupan masyarakat kemudian menjadi benih perubahan sikap bagi anak itu sendiri.

Disamping itu, kurang atau tidak adanya perhatian dan kasih sayang lebih dari orang tua maupun wali serta kurangnya pengawasan terhadap anak selama proses perkembangan sikap acapkali membuat anak terjerumus dalam kejahatan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Era kini seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan, kepentingan, serta persaingan hidup dalam kehidupan bermasyarakat menjadi kendala mutlak yang berimbas kepada kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak, bahkan semua hal tersebut turut serta dirasakan oleh anak itu sendiri. Persaingan hidup yang kemudian melahirkan sebuah kesenjangan antara siapa yang kaya dan siapa yang miskin, siapa yang berani dan siapa yang takut, siapa yang kuat dan siapa yang lemah tidak ditingalkan lagi menjadi salah satu rahim yang melahirkan beberapa jenis kejahatan.

Salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat yakni *carok*, terlebih lagi kejahatan tersebut dilakukan oleh anak yang secara hukum masih dibawah umur. Akan tetapi meski demikian kejahatan tersebut haruslah tetap dipertanggung jawabkan mengingat seberapa genting dan seberapa besar

---

<sup>1</sup> Bambang Hartono, 2015. *analisis terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur*, hal 1-2.

dampak dari tingkat kejahatan yang dilakukan.<sup>2</sup> Kejahatan carok tersebut tentu tidak lepas dari 2 hal yang menjadi keterkaitannya yakni antara lain gejala sosial yang ada dilingkungan anak kemudian kurang pandainya anak melakukan *self control* terhadap ketidakstabilan emosional sehingga hal-hal demikian yang mendorong anak untuk sulit menolak ajakan negatif.

*Carok* adalah salah satu *extraordinarycrime*, makna dari kata carok sebenarnya hanyalah salah satu istilah yang digunakan beberapa suku di Indonesia terutama suku Madura. *Carok* adalah sebuah kejahatan yang serupa dengan tindak pidana penganiayaan namun letak perbedaannya adalah setiap orang yang melakukan *carok* selalu menggunakan benda/alat tajam (*Are'*) untuk melangsungkan aksinya. Di Indonesia fenomena tersebut bukanlah hal yang jarang dijumpai bahkan di setiap tahunnya tidak luput dari pemberitaan tentang terjadinya *carok* diberbagai daerah dengan pelaku yang beragam dari remaja hingga dewasa, namun karena di setiap daerah memiliki istilah yang berbeda-beda dalam menafsirkan kejahatan tersebut sehingga menjadikan istilah *carok* tetap terdengar asing ditelinga masyarakat.<sup>3</sup>

Fenomena seperti halnya kejahatan *carok* yang kerap terjadi ditengah kehidupan masyarakat bukan berarti Indonesia tidak memiliki perangkat hukum untuk mengakomodir kejahatan tersebut. Secara umum, *carok* dalam arti materiil telah termuat dalam salah satu Kitab Undang-Undang di Negara kita yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada mulanya tindak pidana carok seringkali dilakukan oleh para kaum dewasa yang sedang

---

<sup>2</sup> Ibid., hal.3

<sup>3</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Pressindo. Hlm. 35.

bersengketa atau berseteru untuk melindungi kepentingannya namun seiring berjalannya waktu hal tersebut menjadi panorama terbuka terhadap pertontonan dan pendengaran para remaja bahkan anak-anak hingga tak heran jika kini ironisnya banyak mendapati kejahatan *carok* dilakukan oleh kaum remaja bahkan anak-anak, hal tersebut sudah cukup mengindikasikan tentang minimnya *socialcontrol* pada anak dari orang tua, masyarakat maupu negara yang seharusnya turut serta dalam rangka membangun kepribadian anak agar sesuai dengan koridor dan hakekatnya.

Dalam beberapa waktu dekat tepatnya pada tanggal 08 Maret 2017 masyarakat Indonesia kembali diguncang oleh pemberitaan tentang terbunuhnya salah satu siswa MTs di salah satu wilayah Kabupaten Situbondo Jawa Timur lantaran terlibat dalam aksi *carok* bersama teman satu sekolahnya dan ironisnya salah satu anak dalam melangsungkan aksinya menggunakan benda tajam (*Laddhing*) untuk mensejahterai diri dan menjatuhkan lawan *caroknya*, sehingga nahas pada akhirnya salah satu siswa yang terlibat berinisial ABD (Coim) harus meregang nyawa. Hal demikian jika dilihat menggunakan kaca mata perlindungan anak sebagaimana substansi dari UUPA ataupun mengkaji berdasarkan makna kesejahteraan anak seperti halnya yang menjadi substansi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, apakah kejadian seperti halnya demikian tetap terlihat wajar ataukah telah jelas letak *GAP* antara mimpi dari konstitusi kita yang hidup dalam wujud Undang-Undang dengan kenyataan pahit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Situbondo sebagai salah satu kabupaten yang berada di ujung timur pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Timur, keberadaan Situbondo yang cenderung jauh dari hiruk pikuk dunia metropolitan dan permasalahan tentang pendidikan, sarana prasarana dan fasilitas kehidupan yang hingga kini masih terlepas dari perhatian para penguasa sehingga perkembangan dari beberapa aspek kehidupan dapat terbilang cukup lamban termasuk pula dalam perkembangan sumber daya manusianya. Terdapat beberapa hal yang menjadi *impact* dari lambannya perkembangan SDM masyarakat Situbondo yakni antara lain permasalahan kesadaran hukum masyarakat yang cenderung rendah sehingga hal demikian tidak dipungkiri akan berkorelasi terhadap tingkat kejahatan atau kriminalitas oleh manusianya. Beberapa kejahatan dirasa semakin meningkat terutama masalah perampokan, pencurian, penggelapan hingga carok dan pembunuhan. Kasubag Humas Polres Situbondo IPTU H. Nanang Priyambodo dalam keterangannya yang disampaikan melalui media informasi online RRI.co.id mengungkapkan setidaknya dalam tahun 2015-2016 telah terjadi kurang lebih 300 kasus carok dan pembunuhan di Situbondo dan 15% dari kasus tersebut pelakunya adalah anak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak turut serta merasakan betapa ironisnya dampak dari kelambanan perkembangan SDM yang acapkali berujung pada hal-hal yang justru merugikan banyak orang.

Berdasarkan pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi ” hal tersebut menerangkan bahwa anak adalah salah satu subyek hukum nasional yang berarti kehidupan serta hak-haknya wajib dilindungi dan dijamin keberlangsungan tumbuh kembangnya sehingga mampu mencapai titik kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan, dan oleh karena itu pihak-pihak yang memiliki kewajiban sebagai aktor dalam upaya perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak yang melekat pada diri anak antara lain ialah keluarga, masyarakat tentu pula pemerintah.<sup>4</sup> Bunyi pasal tersebut sangat jelas maknanya bahwa anak memanglah sesuatu yang patut diperhatikan secara serius dalam pertumbuhan dan perkembangan hidupnya sehingga pertanyaan mengapa harus anak yang menjadi substansi dari bunyi pasal 28 UUD Republik Indonesia 1945 karna hal sebagaimana diterangkan diawal penulisan latar belakang ini, yakni salah satunya karena anak adalah masa yang rentan akan terjerumus pada hal-hal negatif, anak adalah masa transisi yang membutuhkan banyak perhatian, arahan dan pengawasan dan tentu ada banyak hal lain yang menjadi pertimbangan negara sehingga anak patut menjadi subyek hukum nasional. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> Tedy Sudrajat. 2011. *perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia*, No.54 agustus. 2011. Hlm. 112-113.

tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).<sup>5</sup>

Dalam muatan isi Undang-Undang perlindungan anak (UUPA) telah dijelaskan mengenai ketentuan tentang anak itu sendiri yang secara tegas berdasarkan UUPA ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan juga termasuk seseorang yang masih didalam kandungan. Di sisi lain undang-undang juga menjamin bahwa seorang anak berhak atas suatu perlindungan yang wajib diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara karena hak yang melekat pada diri seorang anak tersebut adalah bagian daripada hak asasi manusia sebagaimana halnya bunyi dari pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal lain yang juga menjadi titik perbedaan dalam UUPA dengan UU lainnya yakni memaknai kata korban yang jika pada umumnya selalu menjadikan seseorang yang mengalami tindak kekerasan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak lain maka ialah yang disebut sebagai korbannya namun dalam UUPA memberikan kedudukan kepada pelaku jika itu adalah seorang anak maka ia pun dapat dikatakan sebagai korban sehingga hal tersebut yang kemudian melatar belakangi lahirnya asas *restorif justice*, keduanya baik korban maupun pelaku berhak atas suatu perlindungan. Kemudian yang kerap menjadi permasalahan yakni bagaimana manusia dewasa ini menyikapi makna daripada perlindungan anak itu sendiri, jika

---

<sup>5</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademi Pressindo.

mengkaji secara luas disekitar kita tidaklah sedikit anak yang seyogyanya hidup sejahtera dan aman justru berakhir tangis di pinggir jalan, entah menjadi korban penistaan, korban penelantaran, korban kekerasan maupun korban asusila. Jika demikian, apakah hal tersebut masih menjadi titik wajar bagi penglihatan masyarakat dan negara dalam mewarnai upaya perlindungan anak atau justru masyarakat merasa tabu akan apakah maksud dari perlindungan anak. Semakin mudarnya rasa empati kemanusiaan dan nilai moral ditengah kehidupan masyarakat dewasa ini yang kemudian menjadi salah satu potensi terhadap maraknya tingkat kejahatan maupun tindak pidana di berbagai aspek kehidupan.

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, PPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Penggunaan instrumen hukum hanyalah sebuah cara penyelesaian dengan tujuan menghukum seseorang, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara menggunakan instrumen norma aturan hukum yang berlaku untuk



menentukan hukuman siapa yang benar dan siapa yang salah.<sup>6</sup> Namun kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (*equality before the law*).<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP dan KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan yang panjang, dimana anak belum mampu dikategorikan sebagaimana orang dewasa yang karakteristiknya memiliki kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya.

Anak didepan hukum mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus ini bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum, karena melalui penegak hukum inilah harapannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban dalam tindak kejahatan *carok* dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan kaedah-kaedah yang hidup di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Sistem Peradilan

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Eresco. hlm.14

<sup>7</sup> *Ibid*. hlm.15

pidana anak dan KUHAP, mengingat bahwa tidak jarang terjadi perlakuan yang sama oleh para aparat penegak hukum terhadap anak sebagaimana memperlakukan orang dewasa sehingga hal demikian yang kemudian menjadi salah satu indikator yang menciderai nilai-nilai hukum khususnya yang berkaitan dengan anak dan sebab itu pula nilai-nilai hukum tersebut menjadi tidak optimal sebagaimana idealnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis kasus tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh anak (Study Kasus tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim di Desa Suboh Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).** ”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kronologis tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh aspendi dan Coim ?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dan tindakan aparat kepolisian Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan kronologis tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim.
2. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim.
3. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan peran serta masyarakat dan tindakan aparat kepolisian Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh Aspendi dan Coim.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi penelitian hukum dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan yang terkait fenomena social terjadinya *carok* yang dilakukan oleh anak.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum pidana pada khususnya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai sanksi dan dampak dari terjadinya tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian atas ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama study di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

## E. Kegunaan penelitian

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang study kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum.

### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami tentang perbuatan *carok* yang dilakukan oleh anak adalah

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian hari berhubungan dengan perbuatan *carok*.

### 3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian agar dapat menjalankan tanggung jawab secara optimal agar tidak terjadi *carok* yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### 4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para mahasiswa mengenai obyek study yang diangkat, sehingga mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif dalam penegakan hukum di tengah kehidupan masyarakat.

## **F. Metode Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikebangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.

## 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan<sup>8</sup>. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-empiris*, penelitian tentang tinjauan *yuridis* terhadap terjadinya *carok* yang dilakukan oleh anak di Desa Demung Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo adalah *Empiris* yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *carok* yang dilakukan oleh anak dan bagaimanakah peran serta masyarakat dan tindakan aparat Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya *carok* yang dilakukan oleh anak.

## 2. Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah peristiwa *carok* yang dilakukan oleh anak, maka penulis lebih memfokuskan di wilayah Desa Demung Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, pertimbangan memilih wilayah ini karena di desa Demung ini pada tanggal 08 Maret 2017 terjadi *carok* yang dilakukan oleh anak, tepatnya oleh siswa-siswa MTs Nurul Wafa tempat para aktor menempuh pendidikan, serta nantinya penulis akan melakukan observasi ke desa dan TKP tersebut di wilayah hukum Kabupaten Situbondo dan melakukan studi di POLRES Situbondo untuk mendapatkan data yang akurat yang sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 112.

## 1. Jenis Data

- a. Data primer: data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama yakni antara lain ialah keluarga dari pihak korban (M. Rizal Syaiful Amin, Kakak Korban), masyarakat (mas Prio, Karang Taruna Desa Demung dan Ust. Ali Wafa, Tokoh Agama Desa Demung), polisi (AIPDA Novita Darmayanti, KANIT PPA POLRES Kabupaten Situbondo), pengacara keluarga korban (bapak Supriono, S.H), guru korban dan pelaku (bapak Abdul Aziz, guru BP korban dan pelaku serta ibu Resti Ayu Fitroh, guru kesiswaan korban dan pelaku). data primer ini bisa diperoleh dengan melakukan observasi ketempat terjadinya *carok* serta melakukan wawancara.
- b. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran media online, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs internet yang relevan dengan pembahasan. Data tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi ( Data primer )

Observasi adalah penulis akan melakukan pengamatan terhadap lokasi terjadinya tindak pidana *carok* dan turut mengamati keadaan

lingkungan sekitar terjadinya tindak pidana *carok* maupun lingkungan tempat tinggal para pihak yang bersangkutan.

b. Wawancara ( Data primer )

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu antara lain ialah keluarga dari pihak korban (M. Rizal Syaiful Amin, Kakak Korban), masyarakat (mas Prio, Karang Taruna Desa Demung dan Ust. Ali Wafa, Tokoh Agama Desa Demung), polisi (AIPDA Novita Darmayanti, KANIT PPA POLRES Kabupaten Situbondo), pengacara keluarga korban (bapak Supriono, S.H), guru korban dan pelaku (bapak Abdul Aziz, guru BP korban dan pelaku serta ibu Resti Ayu Fitroh, guru kesiswaan korban dan pelaku).

c. Studi Dokumentasi ( Data primer )

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

d. Studi Internet ( Data skunder )

Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara pencarian bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini.



### 3. Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka data akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian, atau penjelasan. Analisa data secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normatif didasarkan dari kondisi lapangan tentang tinjauan yuridis empiris terhadap terjadinya tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh anak.



### G. Renacan Jadwal penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Kegiatan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Pengajuan Out Line	X					
2.	Pengajuan Proposal	X					
3.	Seminar Proposal		X				
4.	Revisi proposal		X				
5.	Proses Ijin Penelitian		Xxx				
6.	Penelitian			Xx			
7.	Proses Pembimbingan	x	X	X	x	X	x
8.	Penulisan Laporan				xxxx		
9.	Ujian					X	

### H. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikan hal-hal yang berhubungan dengan hukum tentang analisis yuridis empiris terhadap terjadinya tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh anak.

## **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara mengenai bagaimana tindak pidana *carok* yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor penyebab, bagaimana perpektif KUHP, UU perlindungan anak, UU kesejahteraan dan Sistem Peradilan Pidana Anak dan penanggulangan terjadinya *carok* yang dilakukan oleh anak.

## **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum yang berisikan kesimpulan dan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis yaitu mengenai tinjauan yuridis empiris terhadap terjadinya *carok* yang dilakukan oleh anak.